



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI Tahun 2012

(AUDITED)

**Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat
Telp: 021-390 5455, Fax : 021-390 5455, PO BOX 2685.**



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor : /SET.KY/04/2013 17 April 2013
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Audited
Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2012

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan
Jl. Lapangan Banteng No.2 – 4.
Jakarta Pusat

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER/55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga dengan ini Komisi Yudisial Republik Indonesia menyampaikan Laporan Keuangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012.

Adapun Laporan Keuangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,

Ir. Andi Djalal Latief, M.S
NIP.195905241986031004

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Yudisial Republik Indonesia. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 17 April 2013
Plt. Sekretaris Jenderal,

Ir. Andi Djalal Latief, M.S
NIP.195905241986031004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
A.1. Dasar Hukum	5
A.2. Kebijakan Teknis	5
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	7
A.4. Kebijakan Akuntansi	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	14
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	14
B.2. Belanja Negara	15
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	20
C.1. Aset Lancar	20
C.2. Aset Tetap	22
C.3. Aset Lainnya	30
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	32
C.5. Ekuitas Dana Lancar	33
C.6. Ekuitas Dana Investasi	34
D. Pengungkapan Penting Lainnya	35
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	35
D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	35
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	35
D.4. Rekening Pemerintah	35
D.5. Pengungkapan Lain-lain	35
Laporan-laporan Pendukung	
LRA Pendapatan	
LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
Neraca Percobaan	
Laporan Barang Pengguna	
Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK	
Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011	1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2011	2
Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang	12
Tabel 4 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNB	14
Tabel 5 : Perbandingan Realisasi PNB TA 2012 dan 2011	14
Tabel 6 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012	15
Tabel 7 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 dan 2011	16
Tabel 8 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011	17
Tabel 9 : Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011	18
Tabel 10 : Rincian Pengembalian Belanja Barang	18
Tabel 11 : Perbandingan Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011	19
Tabel 12 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	20
Tabel 13 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	20
Tabel 14 : Rincian Piutang Bukan Pajak	21
Tabel 15 : Rincian Persediaan	21
Tabel 16 : Rincian Persediaan Tidak Lancar (lambat pemakaiannya)	22
Tabel 17 : Rincian Aset Tetap	22
Tabel 18 : Rincian Saldo Tanah	23
Tabel 19 : Rincian Transaksi Penambahan/ (Pengurangan) Peralatan dan Mesin	23
Tabel 20 : Rincian Reklasifikasi ke dalam Aset Lainnya	25
Tabel 21 : Rekapitulasi Penbongkaran Pekerjaan Interior Perpustakaan KYRI TA 2012	27
Tabel 22 : Rekapitulasi Penbongkaran Pekerjaan Penambahan Ruang Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	27
Tabel 23 : Rekapitulasi Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan terkait Pekerjaan Pembongkaran	28
Tabel 24 : Rekapitulasi Reklasifikasi kedalam Aset Lain-Lain terkait Pekerjaan Pembongkaran	28
Tabel 25 : Rincian Aset Lainnya	30
Tabel 26 : Rincian Aset Tak Berwujud	30
Tabel 27 : Barang Milik Negara yang Rusak	31
Tabel 28 : Barang Milik Negara yang Telah Dihapuskan	32
Tabel 29 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	33



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Yudisial Republik Indonesia yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 17 April 2013
Plt. Sekretaris Jenderal,

Ir. Andi Djalal Latief, M.S
NIP.195905241986031004

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2012 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp209.865.777,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp75.729.494.968,00 atau mencapai 97.73 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp77.487.326.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 dan 2011 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011

Uraian	TA 2012			TA 2011
	Anggaran	Realisasi	% Real. thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	-	209.865.777	~	343.537.136
Belanja Negara	77.487.326.000	75.729.494.968	97.73	68.611.548.245

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2012 dan 2011.

Jumlah Aset Tahun 2012 adalah sebesar Rp155.996.229.807,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp865.814.442,00, Aset Tetap sebesar Rp153.303.355.384,00,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp1.827.059.981,00.

Jumlah Kewajiban Tahun 2012 adalah sebesar Rp11.203.459,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana Tahun 2012 adalah sebesar Rp155.985.026.348,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp854.610.983,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp155.130.415.365,00

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/ (penurunan)	
	31 Des 2012 (Rp)	31 Des 2011 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	865.814.442,00	946.285.216,00	(80.470.774,00)	(8.50)
Aset Tetap	153.303.355.384,00	150.803.499.663,00	2.499.855.721,00	1.65
Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-
Aset Lainnya	1.827.059.981,00	1.515.477.475,00	311.582.506,00	20.56
Jumlah Aset	155.996.229.807,00	153.265.262.354,00	2.730.967.453,00	1.78
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	11.203.459,00	29.704.155,00	(18.500.696,00)	(62.28)
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	854.610.983,00	916.581.061,00	(61.970.078,00)	(6.76)
Ekuitas Dana Investasi	155.130.415.365,00	152.318.977.138,00	2.811.438.227,00	1.84
Jumlah Ekuitas Dana	155.985.026.348,00	153.235.558.199,00	2.749.468.149,00	1.79
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	155.996.229.807,00	153.265.262.354,00	2.730.967.453,00	1.78

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2012			TA 2011
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	209.865.777	~	343.537.136
Jumlah Pendapatan	-	209.865.777	~	343.537.136
BELANJA				
1. Belanja Pegawai	8.890.452.000	8.742.781.026	98.34	7.520.168.706
2. Belanja Barang	65.365.618.000	63.773.494.771	97.56	56.268.448.617
3. Belanja Modal	3.231.256.000	3.213.219.171	99.44	4.822.930.922
Jumlah Belanja	77.487.326.000	75.729.494.968	97.73	68.611.548.245

NERACA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(dalam Rp)

NAMA AKUN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2012	2011	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Aset				
Aset Lancar				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	40,747.00	(40,747.00)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	0.00	365,408.00	(365,408.00)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	41.676.185,00	0,00	41.676.185,00	0,00
Persediaan	824,138,257.00	945,879,061.00	(121,740,804.00)	(12.87)
Jumlah Aset Lancar	865,814,442.00	946,285,216.00	(80.470.774.00)	(8.50)
Aset Tetap				
Tanah	47,188,389,400.00	47,188,389,400.00	0.00	0.00
Peralatan dan Mesin	31,500,734,142.00	29,796,908,077.00	1,703,826,065.00	5.71
Gedung dan Bangunan	70,471,586,566.00	69,839,350,735.00	632,235,831.00	0.90
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,450,884,028.00	3,421,134,028.00	29,750,000.00	0.86
Aset Tetap Lainnya	691,761,248.00	557,717,423.00	134,043,825.00	24.03
Jumlah Aset Tetap	153,303,355,384.00	150,803,499,663.00	2,499,855,721.00	1.65
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	1,524,651,246.00	1,306,201,600.00	218,449,646.00	16.72
Aset Lain-lain	302,408,735.00	209,275,875.00	93.132.860.00	44.50
Jumlah Aset Lainnya	1,827,059,981.00	1,515,477,475.00	311,582,506.00	20.56
Jumlah Aset	155.996.229.807.00	153,265,262,354.00	2,730.967.453.00	1.78
Kewajiban				
Utang kepada Pihak Ketiga	11.203.459,00	19,500,000.00	(8.296.541,00)	(42.54)
Uang Muka dari KPPN	0.00	40,747.00	(40,747.00)	(100.00)
Pendapatan di terima di muka	0.00	9,798,000.00	(9,798,000.00)	(100.00)
Pendapatan yang ditangguhkan	0.00	365,408.00	(365,408.00)	(100.00)
Jumlah Kewajiban	11.203.459,00	29,704,155.00	(18.500.696,00)	(62.28)
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar				
Cadangan Piutang	41.676.185,00	0,00	41.676.185,00	0,00
Cadangan Persediaan	824,138,257.00	945,879,061.00	(121,740,804.00)	(12.87)
Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek	(11.203.459,00)	(19,500,000.00)	8.296.541,00	(42.54)
Barang/Jasa yang harus diserahkan	0.00	(9,798,000.00)	9,798,000.00	(100.00)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	854,610,983,00	916,581,061.00	(61,970,078.00)	(6.76)
Ekuitas Dana Investasi				
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	153,303,355,384.00	150,803,499,663.00	2,499,855,721.00	1.65
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	1,827,059,981.00	1,515,477,475.00	311,582,506.00	20.56
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	155.130,415,365.00	152,318,977,138.00	2,811,438,227.00	1.84
Ekuitas Dana	155.985.026.348.00	153,235,558,199.00	2,749.468.149,00	1.79
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	155.996.229.807.00	153,265,262,354.00	2.730.967.453.00	1.78

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI YUDISIAL

*Rencana
Strategis*

Komisi Yudisial RI yang dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan amanah UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 yang selanjutnya telah direvisi dengan UU No.18 Tahun 2011 merupakan perwujudan reformasi lembaga peradilan dan demokratisasi lembaga peradilan. Prinsip demokrasi secara umum mensyaratkan adanya tindakan "*checks and balances*" untuk menjamin tidak

terjadinya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain dimana dalam kaitan ini adalah dominasi lembaga peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Visi Komisi Yudisial RI adalah terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur dan profesional.

Misi Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan profesional.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.
- c. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
- d. Mejaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- e. Menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif dan akuntabel

Rencana aktivitas Komisi Yudisial RI berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai kewenangan dan tugas yang diembannya, secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

- a. *Aktivitas pengusulan Calon Hakim dan Hakim Agung*; demi terwujudnya lembaga peradilan yang berkarakter dan berkompetensi melalui pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan penetapan *Calon Hakim dan Hakim Agung* yang memenuhi kriteria karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan amanah penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan.
- b. *Aktivitas pengelolaan*; mengupayakan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim sebagai instrument peradilan, baik untuk maksud pengembangan *reward system* maupun untuk pengembangan *checks and balances* demi penegakkan kehormatan dan keluhuran lembaga peradilan.
- c. *Aktivitas pengawasan*; mengupayakan terselenggaranya pola pengawasan perilaku hakim oleh masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang cepat dan akurat, dalam upaya penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan dan serta kehati-hatian hakim dalam memutuskan perkara.

- d. *Aktivitas pengendalian*; mengupayakan tindakan cepat dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap perilaku para hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim agar tidak berkembang menjadi ketidakpuasan yang akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga berakibat menurunnya kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2012 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak

pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari

kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satuan Kerja per 31 Desember 2012 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset Lainnya

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; *lisensi* dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase (%) tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/20110 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Sampai saat Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta belum menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Negara dan

Hibah

Rp209.865.777

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp209.865.777,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4
Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	57.200.000	~
2	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	44.091.000	~
3	Pendapatan Denda Keterlambatan	-	3.525.522	~
4	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	-	105.049.255	~
	Jumlah	-	209.865.777	~

Realisasi PNBP Lainnya TA anggaran 2012 mengalami penurunan sebesar Rp133.671.359,00 atau 38,91% dibandingkan TA 2011. Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011

No	Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	57.200.000	-	57.200.000	~
2	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	44.091.000	58.788.000	(14.697.000)	(25.00)
3	Pendapatan Denda Keterlambatan	3.525.522	14.559.858	(11.034.336)	(75.79)
4	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	105.049.255	270.189.278	(165.140.023)	(61.12)
	Jumlah	209.865.777	343.537.136	(133.671.359)	(38,91)

Pada tahun 2012 Komisi Yudisial menerima pendapatan atas Sewa Gedung untuk Kantor Kas Bank BRI serta Ruang ATM, yang terlanjur dicatat di dalam Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan Akun Penerimaan Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin (423142) namun pada prinsipnya penerimaan tersebut merupakan penerimaan atas Sewa Gedung dan Bangunan. Pada tahun 2013 penerimaan tersebut sudah di catat kedalam Akun Penerimaan Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan (423141).

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara
Rp75.729.494.968

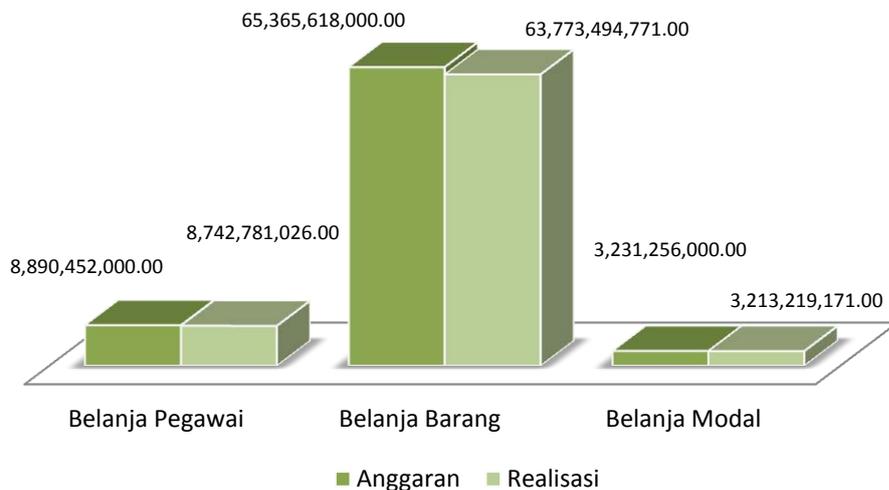
Realisasi belanja Komisi Yudisial pada TA 2012 adalah sebesar Rp75.729.494.968,00 atau sebesar 97,73% dari anggaran setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2012 adalah sebesar Rp77.487.326.000,00. Anggaran dan realisasi belanja TA 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
51	Belanja Pegawai	8.890.452.000	8.742.781.026	98.34
52	Belanja Barang	65.365.618.000	63.773.494.771	97.56
53	Belanja Modal	3.231.256.000	3.213.219.171	99.44
	Jumlah	77.487.326.000	75.729.494.968	97.73

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik. 1
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012



Realisasi belanja TA 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp7.117.946.723,00 atau 10,37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang disebabkan antara lain oleh naiknya belanja pegawai serta kenaikan atas belanja barang berupa belanja perjalanan biasa dan belanja barang non operasional lainnya. Perbandingan realisasi belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Perbandingan realisasi Belanja TA 2012 dan 2011

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		TA 2012	TA 2011	Rp	%
51	Belanja Pegawai	8.742.781.026	7.520.168.706	1.222.612.320	16.26
52	Belanja Barang	63.773.494.771	56.268.448.617	7.505.046.154	13.34
53	Belanja Modal	3.213.219.171	4.822.930.922	(1.609.711.751)	(33.38)
	Jumlah	75.729.494.968	68.611.548.245	7.117.946.723	10.37

Belanja Pegawai
Rp8.742.781.026

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran terkait pemberian kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang. Belanja Pegawai ini terdiri dari Belanja Gaji Dan Tunjangan, Belanja Honorarium/Lembur/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito, dan Belanja Kontribusi Sosial

Realisasi belanja pegawai TA 2012 adalah sebesar Rp8.742.781.026,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.222.612.320,00 atau 16,26% dari tahun sebelumnya sebesar Rp7.520.168.706,00. Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan adanya penambahan jumlah pegawai serta penambahan pejabat struktural. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011

Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Naik/ (Turun) (Rp)	%
BELANJA GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)				
Belanja Gaji Pokok PNS	4,012,612,840.00	3,484,197,320.00	528,415,520.00	15.17
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	207,100,016.00	146,344,260.00	60,755,756.00	41.52
Belanja Tunj. Anak PNS	43,813,479.00	33,267,820.00	10,545,659.00	31.70
Belanja Tunj. Struktural PNS	629,690,000.00	652,390,000.00	(22,700,000.00)	(3.48)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	7,345,000.00	3,955,000.00	3,390,000.00	85.71
Belanja Tunj. PPh PNS	147,824,172.00	110,983,956.00	36,840,216.00	33.19
Belanja Tunj. Beras PNS	199,040,650.00	191,974,650.00	7,066,000.00	3.68
Belanja Uang Makan PNS	770,740,000.00	708,960,000.00	61,780,000.00	8.71
Belanja Tunj. Lain-lain PNS	-	-	-	-
Belanja Tunj. Umum PNS	308,565,000.00	315,915,000.00	(7,350,000.00)	(2.33)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	86,801.00	150,604.00	(63,803.00)	(42.36)
Realisasi Belanja Bruto	6,326,817,958.00	5,648,138,610.00	678,679,348.00	12.02
<i>Pengembalian Belanja</i>	2,004,653.00	2,566,384.00	(561,731.00)	(21.89)
Realisasi Belanja Netto	6,324,813,305.00	5,645,572,226.00	679,241,079.00	12.03
BELANJA GAJI POKOK PEJABAT NEGARA				
Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	367,920,000.00	318,704,900.00	49,215,100.00	15.44
Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	36,792,000.00	33,726,000.00	3,066,000.00	9.09
Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	12,499,200.00	11,457,600.00	1,041,600.00	9.09
Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	996,000,000.00	913,000,000.00	83,000,000.00	9.09
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	187,233,021.00	56,623,380.00	130,609,641.00	230.66
Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	18,744,910.00	14,860,560.00	3,884,350.00	26.14
Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	8,590.00	4,040.00	4,550.00	112.62
BELANJA HONORARIUM				
Belanja Uang Honor Tetap	798,770,000.00	526,220,000.00	272,550,000.00	51.79

Belanja Barang
Rp63.773.494.771

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Dalam pengertian belanja tersebut termasuk honorarium dan vakasi yang diberikan

dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. Belanja Barang ini terdiri dari Belanja Barang (Operasional dan Non-Operasional), Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, Belanja Badan Layanan Umum (BLU), serta Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang TA 2012 adalah sebesar Rp63.773.494.771,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.505.046.154,00 atau 13,34% dari realisasi belanja barang TA 2011 sebesar Rp 56.268.448.617,00. Kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar 13,34% antara lain disebabkan kenaikan belanja barang perjalanan dinas. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9
Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011

Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Barang Operasional	6.208.559.029	5.169.300.793	1.039.258.236	20.10
Belanja Barang Non Operasional	23.685.985.270	23.834.528.233	(148.542.963)	(0.62)
Belanja Jasa	6.676.427.775	5.511.476.219	1.164.951.556	21.14
Belanja Pemeliharaan	6.722.725.961	6.743.003.769	(20.277.808)	(0.30)
Belanja Perjalanan Dinas	20.622.268.754	15.339.717.194	5.282.551.560	34.44
Realisasi Belanja Bruto	63.915.966.789	56.598.026.208	7.317.940.581	12.93
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>(142.472.018)</i>	<i>(329.577.591)</i>		
Realisasi Belanja Netto	63.773.494.771	56.268.448.617	7.505.046.154	13.34

Sampai dengan 31 Desember 2012 terdapat transaksi pengembalian belanja barang. Adapun rincian pengembalian belanja barang sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Pengembalian Belanja Barang

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa Jakarta-Yogyakarta (PP) dalam Rangka Pengembangan dan Penerapan SPIP di Yogyakarta tanggal 27 s.d. 30 Juni 2012	3.610.500
2	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Jakarta-Seoul-Turki (PP) tanggal 26 Mei s.d. 4 Juni 2012	126.038.500
3	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Jakarta-Roma-Perancis (PP) tanggal 26 Mei s.d. 4 Juni 2012 dalam rangka Penjajakan Mekanisme Hakim	3.664.000
4	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa Jakarta-Surabaya tanggal 28 Juni s.d. 1 Juli 2012	9.146.377
5	Pengembalian Dana Operasional Pimpinan (DOP) Tahun Anggaran 2012	12.641
	Jumlah	142.472.018

Belanja Modal
Rp3.213.219.171

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan asset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan dari perencanaan pengadaan, pelaksanaan hingga asset tersebut siap untuk digunakan. Aset tetap/aset lainnya tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publiktercatat sebagai registrasi aset K/L terkait dan bukan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda. Belanja Modal ini terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Lainnya, Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya serta Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Realisasi Belanja Modal TA 2012 adalah sebesar Rp3.213.219.171,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.609.711.751,00 atau sebesar (33,38%) dari realisasi belanja modal TA 2011 Rp4.822.930.922,00. Penurunan sebesar Rp1.609.711.751,00 atau sebesar (33,38%) disebabkan adanya penurunan belanja modal peralatan dan mesin. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011

Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Naik/ (Turun)	
			Rp	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.164.074.720	4.822.930.922	(2.658.856.202)	(55.13)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	875.081.900	-	875.081.900	~
Belanja Modal Fisik Lainnya	174.062.551	-	174.062.551	~
Realiasi Belanja Bruto	3.213.219.171	4.822.930.922	(1.609.711.751)	(33.38)
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	3.213.219.171	4.822.930.922	(1.609.711.751)	(33.38)

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp 0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp40.747,00. Saldo kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 2011 sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	Per 31 Desember 2012	Per 31 Desember 2011
1	Rekening Giro	-	40.747
2	Uang Tunai	-	-
Jumlah		-	40.747

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp 0

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp365.408,00 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari Dana Operasional Pimpinan.

Tabel 13
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Jenis	Per 31 Desember 2012	Per 31 Desember 2011
1	Jasa Giro yang belum di setor ke Kas Negara	-	-
2	Pajak PPh yang belum di setor	-	-
3	Pengembalian Belanja yang belum di setor ke Kas Negara	-	365.408
Jumlah		-	365.408

Piutang Bukan Pajak
Rp41.676.185

C.1.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing adalah sebesar Rp41.676.185,00 dan Rp0,00. yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada Komisi Yudisial adalah merupakan piutang atas koreksi kekurangan volume pekerjaan yang berasal dari Realisasi Belanja Modal Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2012. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Piutang Bukan Pajak

No	Debitur	Jumlah (Rp)
1	PT. NO	37.290.024
2	PT. AKS	4.386.161
Jumlah		41.676.185

Persediaan
Rp824.138.257

C.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing adalah sebesar Rp824.138.257,00 dan Rp945.879.061,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Persediaan

No	Jenis	Per 31 Desember 2012	Per 31 Desember 2011
1	Barang Konsumsi	473.137.018	430.255.473
2	Bahan untuk Pemeliharaan	31.015.940	9.347.900
3	Suku Cadang	34.012.650	36.578.425
4	Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	219.466.550	370.498.510
5	Persediaan Lainnya	66.506.099	99.198.753
Jumlah		824.138.257	945.879.061

Mutasi Persediaan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2011	945.879.061
Mutasi Tambah :	
- Pembelian	54.307.640
Mutasi Kurang :	
- Habis Pakai	(176.048.444)
Saldo per 31 Desember 2012	824.138.257

Namun sampai dengan 31 Desember 2013 terdapat beberapa barang persediaan yang lambat pemakaiannya atau penyerahannya ke pengguna. Barang persediaan yang dimaksud antara lain:

Tabel 16
Rincian Persediaan Tidak Lancar
(lambat pemakaiannya)

No	Barang Persediaan	Saldo Per 31 Des 2012	Tahun Pengadaan
1	Mini DV	145	2010 - 2011
2	Micro Casette 60	659	2010 - 2011
3	Casettle 60 Mtr Sony	392	2010 - 2011
4	Casettle 90 Mtr Sony	300	2010 - 2011
5	Mini DV 90	80	2010 - 2011
6	Buku Kas Umum	3	2010
7	HP Laserjet 27 A Black	1	2010
8	HP Laserjet 74	2	2010
9	Disket Verbatim	39	2010

Kondisi tersebut diatas terjadi disebabkan barang persediaan sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pada saat sekarang, namun pada prinsipnya setiap pengadaan di Komisi Yudisial RI disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja pada saat itu.

Aset Tetap
Rp153.303.355.384

C.2 Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp153.303.355.384,00 dan Rp150.803.499.663,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Komisi Yudisial Republik Indonesia per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Aset Tetap

No	Jenis	Per 31 Desember 2012	Per 31 Desember 2011
1	Tanah	47.188.389.400	47.188.389.400
2	Peralatan dan Mesin	31.500.734.142	29.796.908.077
3	Gedung dan Bangunan	70.471.586.566	69.839.350.735
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.450.884.028	3.421.134.028
5	Aset Tetap Lainnya	691.761.248	557.717.423
Jumlah		153.303.355.384	150.803.499.663

Tanah
Rp47.188.389.400

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Yudisial Republik Indonesia per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp47.188.389.400,00 dan Rp47.188.389.400,00. Tidak terdapat perubahan aset tetap berupa tanah.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2012 terdiri dari:

Tabel 18
Rincian Saldo Tanah

No	Kode	Luas	Nilai
1	2.01.01.04.001	5.780 m ²	47.188.389.400
Jumlah		5.780 m ²	47.188.389.400

Tanah seluas 5.780 m² terletak di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450, Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Peralatan dan Mesin
Rp31.500.734.142

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp31.500.734.142,00 dan Rp29.796.908.077,00.

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2011	29.796.908.077
Mutasi Tambah :	
- Pembelian	2.102.982.800
Mutasi Kurang :	
- Penghapusan	(96.748.000)
- Reklasifikasi ke Pos Aset Lainnya	(302.408.735)
Saldo per 31 Desember 2012	31.500.734.142

Sedangkan transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Tabel 19
Rincian Transaksi Penambahan/(Pengurangan)
Peralatan Aset dan Mesin

Kode	Uraian Aset	Penambahan / (Pengurangan)	
		Unit	Rupiah
3.02.01.01.001	Sedan	4	(96,748,000)
3.05.01.02.007	Mesin Penghitung Uang	1	30,000,000
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	1	4,193,200
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	4	48,763,400
3.05.01.04.003	Rak Besi	60	69,000,000
3.05.01.04.004	Rak Kayu	1	21,945,000
3.05.01.04.020	Lemari Display	1	10,615,000
3.05.01.05.007	CCTV	3	7,666,200
3.05.01.05.010	White Board	2	2,730,000
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	7	16,752,000
3.05.01.05.027	Alat Pencetak Label	1	3,250,000
3.05.01.05.048	LCD Projector / Infocus	7	53,104,000
3.05.01.05.051	Softboard	1	950,000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	16	86,020,000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	57	71,000,000
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	12	6,600,000

3.05.02.01.008	Meja Rapat	1	9,910,000
3.05.02.01.009	Meja Komputer	1	15,930,000
3.05.02.01.021	Pot Bunga	3	2,430,000
3.05.02.01.028	Workstation	12	106,200,000
3.05.02.01.999	Meubelair Lainnya	1	1,500,000
3.05.02.02.001	Jam Mekanis	1	18,800,000
3.05.02.04.001	Lemari Es	5	18,980,000
3.05.02.05.018	Blender	1	500,000
3.05.02.06.002	Televisi	3	21,940,000
3.05.02.06.007	Loudspeaker	2	42,700,000
3.05.02.06.036	Dispenser	2	3,300,000
3.05.02.06.042	Lambang Instansi	1	21,500,000
3.05.02.06.046	Handy Cam	8	62,144,000
3.05.02.06.080	Bracekt Standing Peralatan	2	1,570,000
3.06.01.01.016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	1	7,095,000
3.06.01.01.036	Microphone / Wireless Mic	6	26,189,300
3.06.01.01.079	Microphone Cable	1	1,273,700
3.06.01.01.088	Voice Recorder	23	33,842,000
3.06.01.02.045	Tripod Camera	6	10,420,800
3.06.01.02.118	Head Set	4	2,426,200
3.06.01.02.128	Camera Digital	7	55,298,300
3.06.01.02.130	Lampu Blitz Kamera	1	1,559,700
3.06.01.02.135	LCD Monitor	1	1,503,200
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	19	46,247,400
3.06.02.01.004	Telephone Mobile	5	32,500,000
3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	2	20,100,000
3.06.02.01.010	Mesin Fax	3	7,100,000
3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	14,850,000
3.06.03.23.015	Switcher/Patch Panel	2	5,800,000
3.07.01.01.004	Stetoscope	1	1,215,000
3.07.01.01.005	Tensimeter	2	2,092,500
3.07.01.08.094	Glucometer	1	4,185,000
3.07.01.11.147	Digitalc Signal Processor	1	18,018,000
3.07.01.41.170	Microwave Oven	2	3,000,000
3.09.01.10.029	Kaca Mata Malam	1	22,880,000
3.09.04.04.002	Camera Jam Tangan	2	12,760,000
3.09.04.04.026	Button Camera	2	55,220,000
3.09.04.04.032	Sun Glasses Camera	2	37,290,000
3.09.04.04.999	Peralatan Deteksi Intel Lainnya	16	256,245,000
3.09.04.07.022	Layar Projektor	1	5,710,000
3.10.01.02.001	PC Unit	45	343,678,400
3.10.01.02.003	Note Book	21	161,359,300
3.10.01.02.999	Personal Komputer Lainnya	3	29,330,000
3.10.02.03.003	Printer	14	49,210,400
3.10.02.03.004	Scanner	3	29,477,600

3.10.02.03.011	DVD Writer	1	388,200
3.10.02.03.017	External Hradisk	5	7,833,500
3.10.02.04.002	Router	1	721,500
3.10.02.04.004	Modem	1	2,220,000
3.10.02.04.024	Switch	1	18,250,000
3.11.02.01.005	Converter	1	6,200,000
3.15.04.05.006	Air Conditioning	2	9,500,000
Jumlah			2.102.982.800

Terdapat pekerjaan Pengadaan Logo Komisi Yudisial RI di Lt.5 Gedung Komisi Yudisial RI menggunakan MAK Belanja Barang (521219) senilai Rp21.500.000,00 dengan Sub Output Kegiatan Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan. Sebagaimana tertuang dalam BAST Nomor: 464-B/BAST/PPBJ.KY/IV/2012. Hal tersebut diatas telah dilakukan kapitalisasi kedalam asset peralatan dan mesin dengan uraian asset Lambang Instansi (3.05.02.06.042)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Barang Milik Negara dan konfirmasi atas bukti dokumen Laporan Kondisi Barang per 31 Desember 2012 diketahui bahwa Komisi Yudisial memiliki Barang Milik Negara yang kondisinya rusak berat. Sehingga dilakukan reklasifikasi ke dalam Pos Aset Lainnya. Adapun reklasifikasi ke dalam Pos Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Reklasifikasi ke dalam Aset Lainnya

No	NUP	Uraian Aset	Jumlah	
			Unit	Rupiah
1	33	Note Book	1	7.820.800
2	34	Note Book	1	7.820.800
3	1	Overhead Projector	1	21.807.500
4	18	Camera Digital	1	1.272.000
5	3	Camera Video	1	13.000.000
6	11	Camera Video	1	13.650.000
7	1	Scanner	1	2.500.000
8	2	Scanner	1	1.700.000
9	6	Scanner	1	1.870.000
10	1	DVD Player	1	385.000
11	5	DVD Player	1	600.000
12	1	PC Unit	1	11.500.000
13	3	PC Unit	1	11.147.500
14	4	PC Unit	1	11.147.500
15	5	PC Unit	1	11.147.500
16	6	PC Unit	1	11.147.500
17	7	PC Unit	1	12.000.000

18	8	PC Unit	1	12.000.000
19	9	PC Unit	1	12.000.000
20	10	PC Unit	1	12.000.000
21	11	PC Unit	1	12.000.000
22	42	PC Unit	1	12.100.000
23	45	PC Unit	1	11.000.000
24	46	PC Unit	1	11.000.000
25	47	PC Unit	1	11.000.000
26	48	PC Unit	1	11.000.000
27	103	PC Unit	1	14.520.000
28	5	Facsimile	1	1.755.000
29	7	Facsimile	1	1.650.000
30	1	Mesin Ketik Manual	1	1.150.000
31	14	Printer	1	7.625.000
32	15	Printer	1	2.817.500
33	17	Printer	1	7.200.000
34	41	Printer	1	5.000.000
35	55	Printer	1	3.500.000
36	1	Rak Besi	1	6.450.000
37	25	AC Split	1	6.125.135
Jumlah				302.408.735

Gedung dan Bangunan
Rp70.471.586.566

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp70.471.586.566,00 dan Rp69.839.350.735,00.

Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2011	69.839.350.735
Mutasi Tambah :	
- Pembelian	707.816.715
Mutasi Kurang :	
- Penghapusan	(75.580.884)
Saldo per 31 Desember 2012	70.471.586.566

Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama tahun 2012 sebagai berikut:

- Pekerjaan Relayout Ruang Kerja Lantai 6 Gedung Komisi Yudisial RI sesuai SPK No.1412/Perj/PPK-1.KY/X/2012 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp193.700.000,00
- Pekerjaan Pengadaan Interior Perpustakaan Komisi Yudisial RI sesuai SPK No.1264/Perj/PPK-1.KY/X/2012 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp488.840.000,00

- c. Pekerjaan Pemasangan Kanopi dan Paving Blok Parkir Gedung Komisi Yudisial RI sesuai SPK No.827/SPK/PPK-1.KY/VI/2012 dengan Nilai Kontrak Rp64.990.000,00
- d. Pekerjaan Pembuatan Partisi Ruang Kerja Sekretaris Ketua pada Gedung Komisi Yudisial RI sesuai SPK No.841/SPK/PPK-1.KY/VI/2012 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp14.182.900,00
- e. Pekerjaan Pengadaan Rak Buku dan Lemari Televisi Komisi Yudisial RI sesuai SPK No.966/SPK/PPK-1.KY/VIII/2012 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp40.964.000,00
- f. Pekerjaan Pengadaan Karpas Lift Komisioner sesuai SPK No.1166/SPK/PPK-1.KY/IX/2012 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp18.635.000,00

Pada tahun 2012 terdapat pekerjaan pembongkaran terkait pekerjaan Interior Perpustakaan KYRI serta Penambahan Ruang Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Adapun rincian pembongkaran gedung sebagai berikut:

Tabel 21
Rekapitulasi Pembongkaran
Pekerjaan Interior Perpustakaan KYRI Tahun Anggaran 2012

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bongkar plafond untuk area baca <i>indoor</i> dan ruang <i>audio visual</i>	m ²	20,00	84.702,78	1.694.055,60
2	Bongkar partisi <i>gypsum</i> eks. Ruang Periksa Perkara	m ²	91,00	193.171,09	17.578.569,19
3	Bongkar pintu <i>panel single</i>	unit	2,00	4.261.890,33	8.523.780,66
4	Lampu <i>downlight</i> 18 watt	unit	8,00	183.628,31	1.469.026,48
5	Lampu TL 2 x 36 watt	unit	5,00	666.086,80	3.330.433,00
Jumlah Pengurangan atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan					32.595.864,93

Tabel 22
Rekapitulasi Pembongkaran
Pekerjaan Penambahan Ruang Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pembongkaran dinding bata existing	m ²	93,00	63.755,18	5.929.231,74
2	Pembongkaran pintu	bh	12,00	4.261.890,33	51.142.683,96
3	Pembongkaran plafond <i>gypsum</i>	m ²	48,00	84.702,78	4.065.733,44
4	Pembongkaran lantai keramik	m ²	48,00	82.278,74	3.949.379,52
5	Pembongkaran keramik dinding	m ²	66,42	90.803,74	6.031.184,41
6	Pembongkaran screed lantai	m ²	145,00	76.984,81	11.162.797,45
7	Pembongkaran wastafel	unit	2,00	1.614.804,13	3.229.608,26
8	Lampu toilet pria	unit	4,00	183.628,31	734.513,24
9	Lampu toilet wanita	unit	14,00	183.628,31	2.570.796,34
10	Hexospen	unit	8,00	932.339,93	7.458.719,44

Jumlah Pengurangan atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan	96.274.647,80
--	----------------------

Dari dua pekerjaan pembongkaran tersebut diatas terdapat penghapusan Aset Gedung dan Bangunan serta Reklasifikasi kedalam Aset Lain-lain dikarenakan aset tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi dalam operasional Komisi Yudisial. Namun dikarenakan terdapat kendala teknis dalam proses reklasifikasi aset lain-lain pada Aplikasi SIMAK BMN, maka reklasifikasi tersebut belum dapat dilakukan.

Adapun aset gedung dan bangunan yang telah dihapuskan terkait pembongkaran adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rekapitulasi Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan
Terkait Pekerjaan Pembongkaran

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bongkar plafond untuk area baca <i>indoor</i> dan ruang <i>audio visual</i>	m ²	20,00	84.702,78	1.694.055,60
2	Bongkar partisi <i>gypsum</i> eks. Ruang Periksa Perkara	m ²	91,00	193.171,09	17.578.569,19
3	Pembongkaran dinding bata existing	m ²	93,00	63.755,18	5.929.231,74
4	Pembongkaran plafond <i>gypsum</i>	m ²	48,00	84.702,78	4.065.733,44
5	Pembongkaran lantai keramik	m ²	48,00	82.278,74	3.949.379,52
6	Pembongkaran keramik dinding	m ²	66,42	90.803,74	6.031.184,41
7	Pembongkaran screed lantai	m ²	145,00	76.984,81	11.162.797,45
Jumlah Pengurangan atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan					50.410.951,35

Sedangkan aset gedung dan bangunan yang seharusnya direklasifikasi kedalam aset aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rekapitulasi Reklasifikasi kedalam Aset Lain-lain
Terkait Pekerjaan Pembongkaran

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bongkar pintu <i>panel single</i>	unit	2,00	4.261.890,33	8.523.780,66
2	Lampu <i>downlight 18 watt</i>	unit	8,00	183.628,31	1.469.026,48
3	Lampu TL 2 x 36 <i>watt</i>	unit	5,00	666.086,80	3.330.433,00
4	Pembongkaran pintu	bh	12,00	4.261.890,33	51.142.683,96
5	Pembongkaran washtafel	unit	2,00	1.614.804,13	3.229.608,26
6	Lampu toilet pria	unit	4,00	183.628,31	734.513,24
7	Lampu toilet wanita	unit	14,00	183.628,31	2.570.796,34
8	Hexospen	unit	8,00	932.339,93	7.458.719,44
Jumlah Pengurangan atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan					78.459.561,38

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp3.450.884.028

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp3.450.884.028,00 dan Rp3.421.134.028,00.

Terdapat kenaikan sebesar Rp29.750.000. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2012 terdiri dari instalasi Generating Set Rp2.617.280.034,00, Instalasi Building Automation System (BAS) Rp803.853.994,00 serta Jaringan Telepon Lainnya Rp29.750.000,00. Kenaikan pada tahun 2012 disebabkan adanya penambahan pada Aset Jaringan Telepon Lainnya.

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2011	3.421.134.028
Mutasi Tambah :	
- Pembelian	29.750.000
Mutasi Kurang :	
- Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2012	3.450.884.028

Aset Tetap Lainnya
Rp691.761.248

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp691.761.248,00 dan Rp557.717.423,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2011	557.717.423
Mutasi Tambah :	
- Pembelian	134.043.825
Mutasi Kurang :	
- Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2012	691.761.248

Penambahan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2012 keseluruhannya berasal dari pembelian berupa:

- a. Pengadaan Buku Perpustakaan Komisi Yudisial RI sesuai SPK No.801/SPK/PPK-4.KY/VII/2012 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp92.067.975,00
- b. Pengadaan Buku Perpustakaan Komisi Yudisial RI sesuai SPK No.1230/SPK/PPK-4.KY/XI/2012 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp17.873.850,00

- c. Pengadaan Buku Perpustakaan Komisi Yudisial RI sesuai SPK No.356/SPK/PPK-4.KY/III/2012 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp24.102.000,00

Aset Lainnya
Rp1.524.651.246

C. 3 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp1.524.651.246,00 dan Rp1.515.477.475,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

Tabel 25
Rincian Aset Lainnya

No	Jenis	Per 31 Desember 2012	Per 31 Desember 2011
1	Aset Tak Berwujud	1.524.651.246	1.306.201.600
2	Aset Lain-lain	0	209.275.875
Jumlah		1.524.651.246	1.515.477.475

Aset Tak Berwujud
Rp1.524.651.246

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp1.524.651.246,00 dan Rp1.306.201.600,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Penambahan Aset Tak Berwujud di Tahun 2012 berupa software komputer serta lisensi software komputer yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun rincian penambahan ATB per 31 Desember 2012 adalah

sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Aset tak Berwujud

Kode	Uraian Aset	Penambahan	
		Unit	Rupiah
8.01.01.01.001	Software Komputer	1	22.000.726
8.01.01.01.002	Lisensi	123	196.448.920
Jumlah			218.449.646

Aset Lain-Lain
Rp302.408.735

C.3.2 Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp302.408.735,00 dan Rp209.275.875,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN. Pada tahun 2012 barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat telah dilakukan penghapusan aset.

Adapun rincian barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN sebagai berikut:

Tabel 27
Barang Milik Negara yang Rusak

No	NUP	Uraian Aset	Jumlah	
			Unit	Rupiah
1	33	Note Book	1	7.820.800
2	34	Note Book	1	7.820.800
3	1	Overhead Projector	1	21.807.500
4	18	Camera Digital	1	1.272.000
5	3	Camera Video	1	13.000.000
6	11	Camera Video	1	13.650.000
7	1	Scanner	1	2.500.000
8	2	Scanner	1	1.700.000
9	6	Scanner	1	1.870.000
10	1	DVD Player	1	385.000
11	5	DVD Player	1	600.000
12	1	PC Unit	1	11.500.000
13	3	PC Unit	1	11.147.500
14	4	PC Unit	1	11.147.500
15	5	PC Unit	1	11.147.500
16	6	PC Unit	1	11.147.500
17	7	PC Unit	1	12.000.000
18	8	PC Unit	1	12.000.000
19	9	PC Unit	1	12.000.000
20	10	PC Unit	1	12.000.000

21	11	PC Unit	1	12.000.000
22	42	PC Unit	1	12.100.000
23	45	PC Unit	1	11.000.000
24	46	PC Unit	1	11.000.000
25	47	PC Unit	1	11.000.000
26	48	PC Unit	1	11.000.000
27	103	PC Unit	1	14.520.000
28	5	Facsimile	1	1.755.000
29	7	Facsimile	1	1.650.000
30	1	Mesin Ketik Manual	1	1.150.000
31	14	Printer	1	7.625.000
32	15	Printer	1	2.817.500
33	17	Printer	1	7.200.000
34	41	Printer	1	5.000.000
35	55	Printer	1	3.500.000
36	1	Rak Besi	1	6.450.000
37	25	AC Split	1	6.125.135
Jumlah				302.408.735

Pada tahun 2012 telah dilakukan penghapusan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional senilai Rp209.275.875,00 dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor:187/KEP/SET.KY/V/2012 tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28
Barang Milik Negara
Yang telah dihapuskan

Kode	Uraian Aset	(Jumlah)		
		Unit	Rupiah	
3.05.01.03.007	Mesin fotocopy Folio	1	15.000.000	
3.05.01.05.010	White Board	2	686.400	
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	3	4.972.000	
3.05.01.05.017	Sketsel	1	2.063.000	
3.05.02.02.003	Jam elektronik	2	989.000	
3.05.02.03.004	Mesin Cuci	2	5.700.000	
3.05.02.04.004	A.C Split	2	12.036.500	
3.05.01.04.006	Kipas Angin	1	330.000	
3.05.01.06.036	Dispenser	2	2.770.000	
3.05.02.01.001	Telephone (PABX)	1	75.000.000	
3.05.02.01.003	Pesawat Telephone	29	10.803.375	
3.05.02.01.010	Mesin Fax	1	1.400.000	
3.05.02.02.001	P.C. Unit	11	75.550.000	
3.05.02.03.003	Printer	1	1.975.600	
Jumlah				209.275.875

Barang tersebut diatas telah dilakukan Lelang berupa 1 (satu) paket Barang Milik Negara berupa Inventaris Kantor dari Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI tanggal 6 Juni 2012 dengan Risalah Lelang No.147/2012, Pejabat Lelang Elda Murni,S.Sos.

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Utang kepada Pihak Ketiga Rp11.203.459,00

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp11.203.459,00 dan Rp19.500.000,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar.

Adapun rincian belanja pegawai yang masih harus dibayar per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
(belanja pegawai yang masih harus dibayar)

No	Keterangan	Jumlah
1	Tunjangan Fungsional An. Dr Diah Farida periode Februari s.d. Desember 2012	6.042.395,00
2	Tunjangan Struktural An. Septi Melinda periode November s.d. Desember 2012	1.480.600,00
3	Gaji Susulan An. Dr. Lusia periode Desember 2012	3.680.464,00
Jumlah		11.203.459,00

Uang Muka dari KPPN Rp0,00

C.4.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp40.747,00 merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp0,00

C.4.3 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp365.408,00 merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, penembalian belanja, serta pungutan/potong pajak yang belum disetorkan ke kas negara per tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima

C.4.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Dimuka Rp0,00

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp0,00 dan Rp9.798.000,00 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

Rp854.610.983

Cadangan Piutang

Rp41.676.185

Ekuitas Dana Lancar

C.5.1 Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp41.676.185,00 dan Rp0,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Komisi yudisial dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih .

Cadangan Persediaan

Rp824.138.257

C.5.1 Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp824.138.257,00 dan Rp945.879.061,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam bentuk persediaan.

Dana yang harus

disediakan untuk

pembayaran utang

jangka pendek

(Rp11.203.459,00)

C.5.2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar minus Rp11.203.459,00 dan minus Rp19.500.000,00 Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Belanja/jasa yang masih

harus diserahkan Rp0

C.5.3 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp0,00 dan minus Rp9.798.000,00. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Diinvestasikan

Diinvestasikan

Rp155.130.415.365

Ekuitas Dana

Diinvestasikan dalam
aset tetap

Rp153.303.355.384

C.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp153.303.355.384,00 dan Rp150.803.499.663,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan dalam
aset lainnya

Rp1.827.059.981

C.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.827.059.981,00 dan Rp1.515.477.475,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Didalam peraturan tersebut menyatakan perubahan terkait Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas 5 (lima) Biro dan 1 (satu) Pusat. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 maka Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan memperhatikan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2747.I/M.PAN-RB/9/2012 tanggal 28 September 2012, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor: 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dalam lampiran.

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

D.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah

- Bank BRI Cabang Veteran Jakarta A/C 0329.0.001773.30.7 a.n. Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial RI

D.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Plt. Sekretaris Jenderal

Andi Djalal Latief
NIP 19590524 198603 100 4